

ABSTRAK

Abidir Rahman. NIM 210211040083, Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pelindungan Konsumen Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, Pembimbing Pertama Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan Pembimbing Kedua Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.H. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Tahun Lulus 2023.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pelaku Usaha Sektor Keuangan dan Konsumen lembaga keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Tingkat pemahaman konsumen terhadap produk/jasa keuangan yang masih rendah menyebabkan konsumen terkadang merasa dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan dan pada akhirnya menimbulkan sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen. Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan melakukan upaya perlindungan konsumen dengan cara melaksanakan literasi keuangan dan penyelesaian penanganan pengaduan konsumen lembaga keuangan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa Efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan teori "*Effectiveness of Law*" yang berfokus pada pembahasan pasal 28, pasal 29, pasal 30 dan pasal 31 dalam hal perlindungan konsumen pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK sudah berjalan secara efektif dan memenuhi indikator tolak ukur dalam pelaksanaan efektivitas hukum sebagaimana teori *Effectiveness of Law* Professor Anthony Allott yaitu a) *preventif*, b) *curative*, dan c) *facilitative*. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK menjadi payung hukum bagi OJK dan Lembaga Keuangan Syariah untuk melaksanakan edukasi dan literasi, memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam menggunakan produk/jasa keuangan dan menjadi landasan bagi OJK untuk menyelesaikan permasalahan/sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen sehingga permasalahan dapat terselesaikan secara adil.

ABSTRACT

Abidir Rahman. NIM 210211040083, The Effectiveness of Law of The Republic Of Indonesia Number 21 of 2011 On Financial Services Authority To Consumer Protection Of Islamic Financial Institutions In Indonesia, Supervisor by Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. and Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.H., at The Postgraduate Sharia Economic Law Study Program at UIN Antasari Banjarmasin, Graduating Year 2023.

Keywords: Financial Services Authority, Financial Services Business Actors, Consumers and Public Protection.

Financial Services Authority is formed based on the Law of The Republic Of Indonesia Number 21 of 2011 On Financial Services Authority. The Financial Services Authority is established with the objective so that the overall activity of financial services in the financial services sector is held in an orderly, fair, transparent, and accountable manner, as well as capable of realizing the growth of the financial system that grows in is a sustainable and stable, and able to protect the interests of consumers and public. Financial Services Business Actors and consumers financial services are like two side of coins that can't be separated and are mutually interdependent. The level of consumers understanding of financial products or services is still low. That is cause consumers sometimes feel disadvantaged by financial service business actors and ultimately lead to disputes between financial service business actors and consumers. For this reason, the Financial Services Authority is making efforts to protect consumers by carrying out financial literacy and resolving financial institution consumer complaints.

This research was conducted to analyzing the effectiveness of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority using the "Effectiveness of Law" theory which focuses on discussing articles 28, article 29, article 30 and article 31 in terms of consumer protection in sharia financial institutions in Indonesia. This research is normative legal research using the statutory approach method.

This research shows the results that consumer protection at Sharia Financial Institutions in Indonesia as regulated in Article 28, Article 29, Article 30 and Article 31 of Law no. 21 of 2011 concerning OJK has been running effectively and meets the indicators as per Professor Anthony Allott's theory of Effectiveness of Law, namely a) preventive, b) curative, and c) facilitative. The Law no. 21 of 2011 concerning OJK becomes a legal formalism for OJK and Sharia Financial Institutions to carry out education and literacy, provide legal protection for consumers in using financial products/services and also become a basic for OJK to resolve disputes between financial service business actors and consumers to resolved their problems fairly.